

FINTECH CORNER



Sepanjang kuartal II (April - Juni 2021) AFTECH menyelenggarakan berbagai kegiatan penting. Bulan April 2021 dibuka dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi dan pelaku industri. Di AFTECH, bulan April 2021 juga ditandai dengan berbagai pertemuan Kelompok Kerja, pertemuan institusi keuangan anggota AFTECH dan mitra teknologi, kegiatan Meet the Regulator serta peluncuran Handbook Solusi Fintech UMKM.

Sementara itu, pada bulan Mei dan Juni 2021, AFTECH berhasil menyelenggarakan Rapat Umum Anggota I dan Rapat Umum Anggota II, di mana para anggota AFTECH telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta memilih Pengurus yang baru.

Sorotan

- Audiensi dengan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini
- Rapat Umum Anggota AFTECH
- Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)
- Perkembangan terkini Kelompok Kerja AFTECH
- FinTech Talk
- Executive of the Month: Bapak Iwan Kurniawan, Wakil Bendahara I Dewan Pengurus Harian AFTECH, Co-Founder & COO Modalku

Di bawah kepemimpinan baru AFTECH, kami juga melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini guna mendiskusikan peran fintech dalam mendukung penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

Audiensi dengan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini



Jakarta, 24 Juni 2021. Dewan Pengurus Harian AFTECH Periode 2021-2025 yang diwakili oleh Ketua Umum **Bapak Pandu Sjahrir** dan Wakil Sekretaris Jenderal **Bapak Alwin Kiemas**; serta **Ibu Mercy Simorangkir** (Direktur Eksekutif, AFTECH) melakukan audiensi dengan **Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini** guna mendiskusikan peran fintech dalam mendukung penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

Ibu Menteri Sosial memberikan dukungan sekaligus pandangan terhadap pemanfaatan fintech dalam mempercepat dan mendukung penyaluran bantuan sosial serta meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan sosial ke depannya. Inovasi fintech diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran bansos.

“Sesuai Perpres bansos melalui Himbara, namun seiring perkembangan tidak mungkin

lagi manual tanpa bantuan teknologi. Penggunaan alat secara manual masih banyak kekurangan dan tidak tepat sasaran bagi para Penerima Manfaat (PM),” ujar Ibu Tri Rismaharini. Dibandingkan dengan alat berbasis teknologi, penggunaan dan proses manual dinilai banyak kekurangan terlebih untuk pengawasan dan pengendalian program.



Inovasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan menggunakan fintech dalam penyaluran bansos merupakan sistem yang digunakan hampir di seluruh dunia. "Kami welcome dengan fintech yang saat ini hampir di seluruh dunia digunakan keuangan yang berbasis digital tersebut," katanya.

Kelebihan inovasi fintech dalam penyaluran bansos, yaitu selain lebih cepat dan akurat, tapi juga lebih efektif dan efisien. "Jelas itu akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk memudahkan pengendalian, kontrol dan pengawasan," tandas Mensos.

Pada awal ditunjuk menjadi Menteri Sosial (Mensos), Presiden menunjukkan hasil survei kedua tentang pemanfaatan bansos oleh para penerima. Hasil survei kedua dengan menggunakan fintech dapat mendeteksi penerima manfaat yang membelanjakan bansos diluar ketentuan.

"Misalnya, jika di software tidak ada jual rokok maka tak seorang pun bisa membeli rokok. Artinya, untuk pengendalian dan pengawasan lebih mudah dilakukan," katanya. Untuk penyaluran bansos dengan menggunakan fintech, Kemensos akan menggandeng Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Implementasi fintech itu akan secepatnya kami lakukan dan semoga bisa dilaunching pada tanggal 17 Agustus ini," pungkasnya.

Turut hadir di acara tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, **Bapak Pepen Nazaruddin**; dan Direktur Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin, **Bapak Asep Sasa Purnama**, Staf Khusus Menteri Sosial **Bapak Don Rozano Sigit Prakoeswa** (SKM Bidang Komunikasi Media Massa), **Bapak Suhadi Lili** (SKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian), **Bapak Luhur Budijarso Lulu** SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan **Bapak Doddi Madya Judanto** (SKM Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin).





Pengumuman Hasil Rapat Umum Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) II

Nomor Surat: 005/Governance/VI/2021

Jakarta, 2 Juni 2021

Berdasarkan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Fintech Indonesia Tahun 2021;
2. Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota (RUA) Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Nomor Surat: 002/Governance/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;
3. Pengumuman Hasil Rapat Umum Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) I Nomor Surat: 003/Governance/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021;
4. Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota (RUA) AFTECH Kedua Nomor Surat: 004/Governance/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021;
5. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Pendaftaran serta Fit and Proper Test Kepengurusan AFTECH Periode 2021-2025 Nomor Surat: 006/Governance/VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021,

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, pukul 09.00 WIB telah menyelenggarakan Rapat Umum Anggota AFTECH yang Kedua (RUA II) dengan tatap muka sistem online/virtual. RUA II tersebut dihadiri oleh 190 anggota tetap dan 3 anggota kehormatan. Peserta anggota tetap yang hadir adalah 67% dari 282 total anggota tetap sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) AFTECH.

Agenda utama dari RUA II AFTECH adalah Pemilihan Paket Kepengurusan AFTECH 2021-2025. Adapun paket yang memenuhi persyaratan pemilihan dan lolos tahap pemeriksaan pendaftaran serta fit and proper test adalah paket dengan Calon Ketua Umum Bapak Pandu Patria Sjahrir; Calon Ketua Dewan Pengawas Bapak Rudiantara; serta Calon Ketua Dewan Kehormatan/Etik Bapak John Patrick Ellis. Dari hasil pemungutan suara, anggota tetap AFTECH telah menyetujui Paket Kepengurusan AFTECH 2021-2025 dengan susunan sebagai berikut:



Bapak Pandu Sjahrir

*Ketua Umum Dewan Pengurus Harian
Periode 2021-2025*



Bapak Rudiantara

*Ketua Dewan Pengawas
Periode 2021-2023*



Bapak JP Ellis

*Ketua Dewan Kehormatan/Etik
Periode 2021-2025*

Dewan Pengurus Harian 2021-2025

Ketua Umum: Bapak Pandu Sjahrir, PT Airpay Internasional Indonesia (ShopeePay)
 Wakil Ketua Umum I: Bapak Karaniya Dharmasaputra, PT Bareksa Portal Investasi (Bareksa)
 Wakil Ketua Umum II: Bapak Aldi Haryoprato, PT Rekan Usaha Mikro Anda (Mapan)
 Wakil Ketua Umum III: Bapak Harianto Gunawan, PT Visionet Internasional (OVO)
 Wakil Ketua Umum IV: Bapak Marshall Pribadi, PT Privy Identitas Digital (PrivyID)
 Sekretaris Jenderal: Bapak Budi Gandasoebrata, PT Dompot Anak Bangsa (GoPay)
 Wakil Sekretaris Jenderal I: Bapak Dickie Widjaja, PT Investree Radhika Jaya (Investree)
 Wakil Sekretaris Jenderal II: Bapak Firlie Ganinduto, PT Solusi Inklusi Finansial (Finpedia)
 Wakil Sekretaris Jenderal III: Bapak Alwin Kiemas, PT Jelas Karya Wasantara (VeriJelas)
 Wakil Sekretaris Jenderal IV: Ibu Satiriantinah Bur Rasuanto, PT Indonesia Digital Identity (VIDA)
 Bendahara: Ibu Haryati Lawidjaja, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
 Wakil Bendahara I: Bapak Iwan Kurniawan, PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)
 Wakil Bendahara II: Ibu Chrisma Albandjar, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA)

Dewan Pengawas AFTECH periode 2021-2025

Ketua Dewan Pengawas: Bapak Rudiantara
 Anggota: Bapak Alvin Sariaatmadja, Bapak Garibaldi Thohir, Bapak Moh. A. R. P. Mangkuningrat,
 Bapak Niki Santo Luhur, Bapak Ronald Waas, dan Bapak Sebastian Togelang

Dewan Kehormatan/Etik AFTECH periode 2021-2025

Ketua Dewan Kehormatan/Etik: Bapak John Patrick Ellis, Ibu Alison Jap, Bapak Ardi Sutedja, Bapak Bernardus Billy, Bapak Freddy Karyadi, Ibu Lesly Goh, dan Bapak Wemmy Muharamsyah

!! Reminder: Pendaftaran Ulang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat !!



Jakarta, 20 April 2021. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, AFTECH menyelenggarakan kegiatan Meet the Regulator yang mengambil tema "Sosialisasi Teknis Permenkominfo No.5/2020 Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat". Kegiatan ini menghadirkan **Ibu Mariam F Barata** selaku Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sebagai narasumber. Di samping sosialisasi hal-hal teknis seperti tambahan dalam daftar (checklist) yang harus dilengkapi oleh PSE lingkup privat, Ibu Miriam mengingatkan seluruh PSE untuk segera melaksanakan pendaftaran ulang. Berdasarkan informasi sejauh ini, batas waktu pendaftaran ulang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat akan diperpanjang sampai tanggal **2 Desember 2021**.

Sebagai informasi, setiap aplikasi yang ada di Indonesia wajib melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, di mana seluruh PSE lingkup privat wajib untuk mendaftarkan diri. Dalam peraturan yang sama, PSE lingkup privat yang telah mendapatkan Tanda Daftar PSE Lingkup Privat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Guna membantu proses pendaftaran atau pendaftaran ulang PSE, Kominfo telah mengeluarkan booklet dan video tutorial. Materi tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://komin.fo/pendaftaranpseprivat>.

Perhelatan FEKDI 2021: Barometer Perkembangan Ekonomi Keuangan Digital Indonesia



Jakarta, 5-8 April 2021. Sebagai salah satu langkah konkret dalam mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, baik di pusat maupun di daerah, Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi dan pelaku industri menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021, yang merupakan perhelatan pertama di Indonesia.

Mengangkat tema "Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia", FEKDI digelar pada 5-8 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (*launching*), pameran (*showcase*), diskusi, wawasan pimpinan (*leader's insight*), dan gelar wicara (*talkshow*). FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dalam perhelatan ini, peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 juga dilakukan. Pembentukan Satgas P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk: (i) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta (ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Dalam rangka penguatan koordinasi antara Pusat dan Daerah, di tingkat daerah juga dibentuk TP2DD, baik untuk

tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang diketuai oleh Kepala Daerah. Jumlah TP2DD yang telah terbentuk sebanyak 135 baik di tingkat Provinsi maupun Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam pembukaan acara, Gubernur BI, **Bapak Perry Warjiyo**, menyampaikan bahwa BI mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber. Terkait TP2DD, BI baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BI di 34 provinsi mendukung sepenuhnya langkah-langkah mensukseskan pelaksanaan tugas TP2DD.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, **Bapak Airlangga Hartarto**, menyampaikan bahwa kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Strategi Nasional Ekonomi Digital, tambah Menko Airlangga, yang ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi, bertujuan untuk mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Terkait hal ini, AFTECH dan Kemenko Perekonomian RI sepakat bahwa koordinasi dan kolaborasi di antara kedua pihak sangatlah diperlukan untuk mengembangkan berbagai ragam layanan keuangan digital, sekaligus meningkatkan edukasi terkait industri layanan keuangan digital dan teknologi kepada masyarakat luas. Untuk itulah, pada tanggal 27 Januari 2021 silam, kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Digital Nasional melalui Pemanfaatan Layanan Keuangan Digital.

Pada kesempatan tersebut pula, Menteri Keuangan RI, **Ibu Sri Mulyani Indrawati**, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, **Bapak Johnny G. Plate**, dan Ketua Dewan Komisiner OJK, **Bapak Wimboh Santoso**, menyampaikan masing-masing dukungannya dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional di area kebijakan fiskal, infrastruktur jaringan, dan kesiapan perbankan serta sektor keuangan nasional.

Sumber: [Bank Indonesia](#)

Pemanfaatan Identitas Digital: Sinergi dalam Optimalisasi Pemanfaatan Data Melalui Identitas Digital untuk mendukung perluasan EKD



Kamis, 8 April 2021. Dalam salah satu sesi di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, **Bapak Akhmad Sudirman Tavipiyono (Tavip)**, menyatakan harapannya bahwa identitas digital sudah bisa diterapkan secara nasional pada semester kedua tahun 2021.

Bapak Tavip menjelaskan bahwa KTP elektronik yang berbentuk fisik sekarang akan dibuatkan secara digital. Identitas digital tersebut bersifat melengkapi KTP elektronik, bukan menggantikan.

"Kami sudah menyiapkan sistem baru. Jadi, KTP itu boleh ada KTP yang dipegang dan KTP yang digital," kata Bapak Tavip.

Ia mengatakan bahwa KTP digital akan tersedia di perangkat pengguna sehingga tidak dalam bentuk fisik seperti sekarang. Ke depannya, KTP digital akan diperluas lagi penggunaannya dan tidak sebatas untuk identitas seseorang. Sementara itu, Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, **Ibu Martha Simbolon**, sepakat bahwa identitas digital di era digital ini adalah sesuatu yang diperlukan dan harus dikembangkan secara aman. Menurutnya, di kawasan Asia Tenggara, baru Singapura yang telah memanfaatkan identitas digital, lalu disusul Brunei Darussalam dan Thailand yang masih dalam tahap pengembangan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Task Force Pelindungan Data Pribadi Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Founder & CEO PrivyID, **Bapak Marshall Pribadi**, mengusulkan agar penyelenggara identitas digital bisa pula dilakukan oleh swasta.

"Bisa diserahkan ke swasta maupun BUMN biasanya, beberapa negara [mengadopsi cara itu] di Uni Eropa ada It sme, bankID, infocert (certificate authority besar di EU yang dipegang swasta)," katanya.

Menurut Bapak Marshall, diperlukan adanya lebih dari satu penyelenggara identitas digital di sebuah negara karena layanan identitas digital merupakan fondasi ekonomi digital yang sangat krusial sehingga ketika misalnya pusat datanya diretas, dampaknya akan sangat besar.

"Single point of failure itu sangat berbahaya bagi suatu negara sehingga di berbagai negara dengan populasi yang besar biasanya tidak diselenggarakan single oleh pemerintah. Biasanya beberapa lembaga swasta diberikan izin. Seperti di EU, ada eIDAS (electronic Identification, Authentication and Trust Services) sebagai landasannya, di mana beberapa lembaga swasta dapat menyelenggarakan identitas digital tadi," tutup Bapak Marshall.

Sumber: cyberthreat.id

Virtual FGD: Pengaruh Pengaturan Perlindungan Data Pribadi (PDP) terhadap Fintech



Senin, 5 April 2021. Kemajuan yang pesat dalam industri fintech nasional telah membawa berbagai manfaat positif bagi perekonomian secara umum dan pengguna fintech secara khusus. Kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, hadirnya beragam solusi keuangan bagi UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarya di bidang fintech merupakan beberapa manfaat yang dapat dirasakan. Di saat yang sama, terdapat pula risiko seperti potensi penyalahgunaan data pribadi yang erat kaitannya dengan tata kelola dan kerahasiaan data. Untuk itulah, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai payung hukum.

Sebagai regulator yang bertugas mengatur, mengawasi serta melindungi konsumen, OJK menyelenggarakan kegiatan Virtual FGD untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara fintech atas RUU PDP. **Bapak Triyono Gani**, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pesatnya perkembangan inovasi keuangan digital harus diimbangi dengan inovasi yang bertanggung jawab dan mengedepankan perlindungan konsumen.

Sebagai perwakilan industri dan Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi AFTECH, **Ibu Shinta Loekito**, mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam rangka menjaga privasi dan keamanan data konsumen. Menurut Ibu Shinta, hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penerapan standar layanan digital yang bertanggung jawab di tengahnya upaya membangun perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Gugus Tugas PDP dapat menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate) melalui email: aida.rezalina@fintech.id atau mobile: +62 811 -8002-343.

Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen



Senin, 12 April 2021. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen, yang efektif berlaku sejak 22 Desember 2020, Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara virtual yang dibuka oleh Deputy Gubernur **Bapak Doni P. Joewono**. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri dan masyarakat akan perlindungan konsumen serta mendorong implementasi dari PBI ini.

PBI ini menyempurnakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang sudah ada dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan inovasi keuangan digital. Termasuk dalam pokok pengaturan adalah kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, termasuk melalui penerapan consumer consent.

Versi lengkap PBI No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dapat diunduh melalui tautan berikut: https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_222020.aspx

Diskusi Kemenko PMK Bersama Pokja G2P AFTECH Terkait Persiapan Uji Coba/Pilot Project Penyaluran Bansos Secara Digital

Senin, 19 April 2021. AFTECH, yang diwakili oleh **Ibu Mercy Simorangkir** (Managing Director) dan **Ibu Kurie Suditomo** (Ketua Pokja G2P), menghadiri kegiatan diskusi terkait persiapan *pilot project* yang akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga. Dihadiri oleh Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Kementerian Sosial RI, Bank Indonesia, dan TNP2K, diskusi ini menyambung rencana ujicoba G2P 4.0 yang telah dibahas sebelumnya. Pihak-pihak yang hadir sepakat bahwa amandemen/pemutakhiran dari Perpres No 63 Tahun 2017 perlu dilakukan demi mendukung penyaluran bantuan sosial *omnichannel* atau melalui saluran selain Bank HIMBARA.

Secara khusus, Kementerian Koordinator PMK RI mencatat adanya hambatan pada 202 wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan geografis sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri ketika nantinya dilakukan penyaluran bantuan sosial *omnichannel*. Sejauh ini ini, Bappenas bersama berbagai Kementerian/Lembaga lainnya merencanakan untuk melakukan uji coba bantuan non-tunai pada 2021.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pokja G2P, silakan menghubungi Gusti (Policy Associate) melalui email: gusti.raganata@fintech.id atau mobile +62 811-104-2989.

Statistik dan Pengarahan Pencatatan IKD Batch 11



Jumat, 30 April 2021. Dalam sesi pemberian arahan Pencatatan Inovasi Keuangan Digital Batch 11 yang diadakan secara virtual, iTruzz, penyelenggara IKD (Inovasi Keuangan Digital) anggota AFTECH, mendapatkan status “Tercatat” di OJK Grup Inovasi Keuangan Digital

(OJK GIKD) dan mengikuti program Regulatory Sandbox OJK. Saat ini, iTruzz menjadi satu dari lima penyelenggara fintech model bisnis Transaction Authentication yang tercatat dari OJK. Dalam sesi ini, **Bapak Triyono Gani**, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, menekankan pentingnya kepatuhan dari para penyelenggara fintech terhadap peraturan-peraturan OJK serta pedoman perilaku dan standar industri yang telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh Asosiasi atas arahan OJK.

Saat ini terdapat 15 klaster atau model bisnis yang telah didefinisikan pada Regulatory Sandbox OJK, yaitu Innovative Credit Scoring, Aggregator, Financial Planner, Funding Agent, Financing Agent, E-KYC, RegTech, InsurTech, Insurance Hub, Online Distress Solution, Insurance Broker Marketplace, Tax & Accounting, Transaction Authentication, Property Investment Management, dan Blockchain Based.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penyelenggara IKD Tercatat OJK dapat menghubungi Praswistiadi Syamsuri (Policy Director) melalui email: praswistiadi@fintech.id atau mobile: +62 878-7738-8901.

Kick-off Meeting Pokja Insurtech

April 2021. Kelompok Kerja Insurtech telah melaksanakan pertemuan sepanjang bulan April 2021 untuk membahas berbagai tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kegiatan usaha. Kelompok Kerja ini beranggotakan para anggota AFTECH yang berasal dari model bisnis Insurtech dan Asuransi Konvensional. Melalui pertemuan yang dilakukan, para anggota Pokja sepakat bahwa dalam mengembangkan industri insurtech nasional, regulasi yang lebih mengerucut untuk menyesuaikan fungsi dari insurtech sangat diperlukan. Dengan adanya regulasi khusus sebagaimana yang misalnya dimiliki oleh model bisnis P2P, diharapkan bahwa industri insurtech dapat berkembang secara optimal serta mendapatkan ruang yang cukup untuk berkolaborasi dengan perusahaan Asuransi Konvensional.

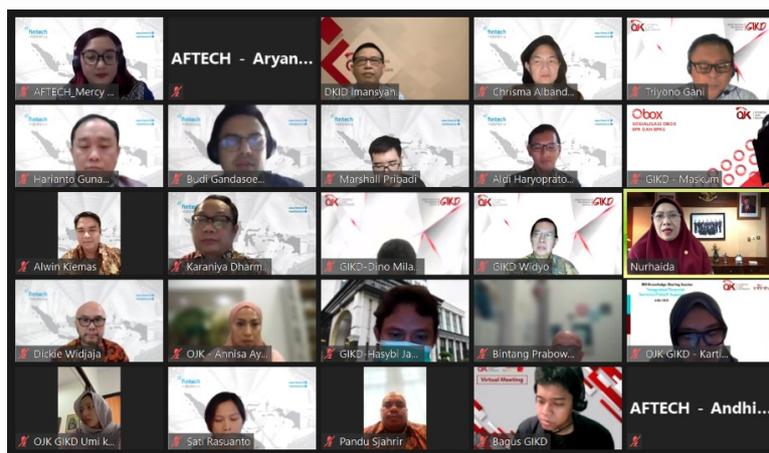
Di sisi lain, para anggota Pokja selanjutnya akan menyelenggarakan pemilihan struktur dan menyusun rencana kerja. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja Insurtech dapat menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate) melalui email: aida.rezalinaefintech.id atau mobile: +62 811 -8002-343.

Audiensi dengan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida Ibu Nurhaida

Kamis, 17 Juni 2021. Setelah resmi dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota AFTECH pada 2 Juni 2021, Dewan Pengurus Harian AFTECH periode 2021-2025 melakukan audiensi resmi pertamanya dengan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida Ibu Nurhaida yang dihadiri juga oleh Bapak Imansyah (Deputi Komisiner OJK Institute & Keuangan Digital) dan Bapak Triyono Gani (Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital/GIKD).



Dalam pertemuan ini Ketua Umum AFTECH, Bapak Pandu Syahrir, kembali menegaskan komitmen AFTECH dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai asosiasi bagi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dan akan terus meningkatkan kolaborasi strategis dalam rangka membangun industri fintech nasional yang mengedepankan inovasi yang bertanggung jawab serta berdaya saing tinggi.



Pertemuan dengan Badan Kebijakan Fiskal



Rabu, 23 Juni 2021. Dalam rangka Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), perwakilan Dewan Pengurus Harian AFTECH menghadiri pertemuan pembahasan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan bersama perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan pada hari Rabu 23 Juni 2021.



Selain mendiskusikan masukan-masukan AFTECH terhadap penyusunan RUU ini yang telah disampaikan sebelumnya, pada pertemuan ini juga didiskusikan beberapa masukan tambahan serta langkah lanjutan dari advokasi AFTECH bersama BKF dalam mendukung penyusunan RUU P2SK dan dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi dan mendukung terciptanya sektor jasa keuangan nasional yang berdaya saing tinggi.

AFTECH Financial Institution & Technology Partners Meeting

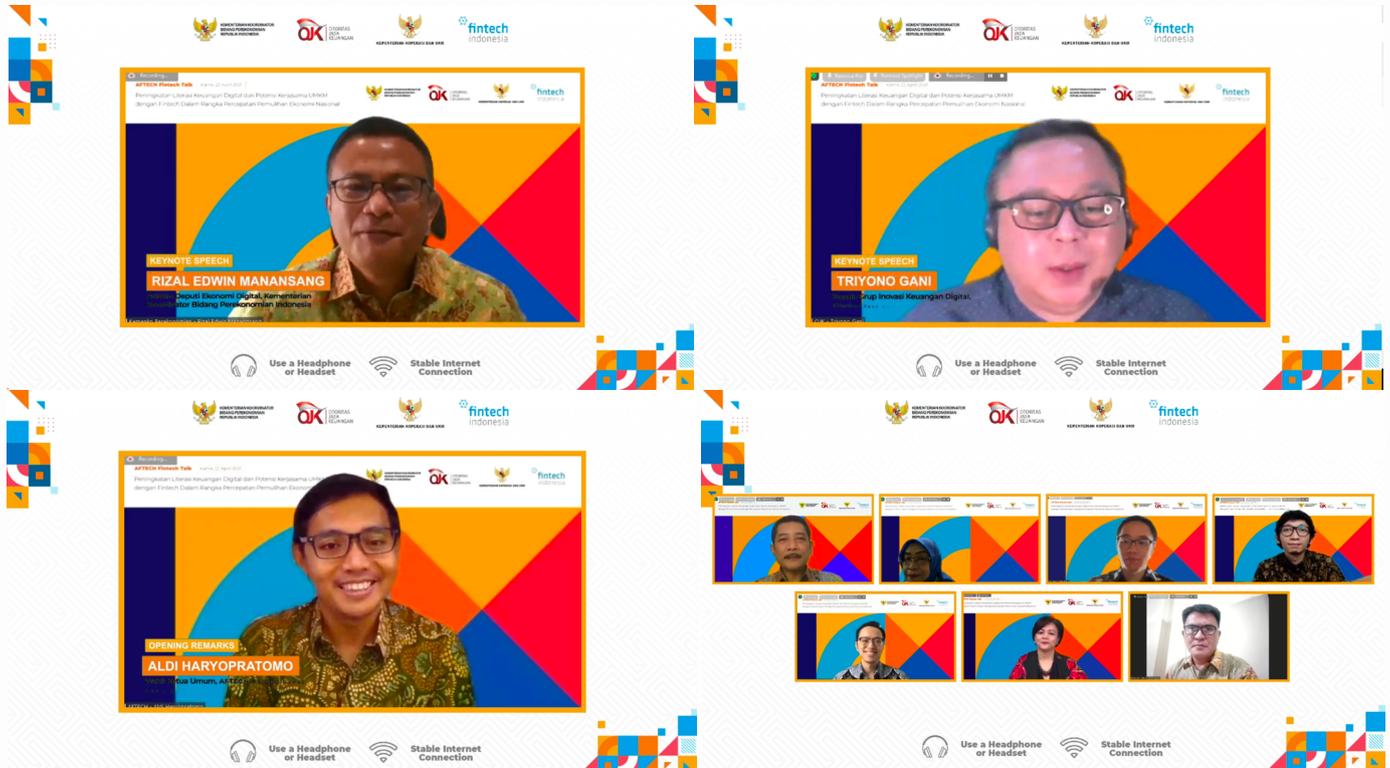


Selasa, 6 April 2021. Dalam rangka meningkatkan sinergi antara fintech, institusi keuangan, dan mitra teknologi dalam ekosistem layanan keuangan digital serta membahas isu-isu terkini yang terkait dengan perkembangan industri dan regulasi, AFTECH menyelenggarakan Financial Institution & Technology Partners Meeting. Dibuka oleh **Ibu Alison Jap** (Ketua Eksekutif Bidang Kemitraan AFTECH & Chief International Partnership Officer, DOKU), pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Bank BNI, Bank Danamon, Amar Bank, Bank DBS, Mastercard, Astra Life, Manulife, Phillip Sekuritas, Lenovo, Google, Amazon Web Services (AWS), Cisco, dan Telkomsel.

Dalam presentasi pembukanya, Ibu Alison memaparkan tren industri fintech dan perkembangan regulasi dalam kuartal pertama 2021 serta menyampaikan peran AFTECH terhadap perkembangan industri fintech nasional. Setelah presentasi pembuka disampaikan, kegiatan ini juga memperkenalkan model bisnis fintech dari model bisnis insurtech, yang diwakili oleh **Bapak Tommy Martin** selaku Co-Founder & COO Qoala. Bapak Tommy berkesempatan untuk menyampaikan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh Qoala dalam hal penciptaan produk baru dan percepatan proses *underwriting* dan klaim, serta potensi kolaborasi penyelenggara fintech dari model bisnis insurtech dengan institusi keuangan seperti bank di Indonesia.

Pertemuan ini merupakan wujud keyakinan AFTECH bahwa sinergi dan kolaborasi antara penyelenggara fintech, institusi keuangan serta mitra-mitra teknologi dalam ekosistem layanan jasa keuangan digital nasional adalah sesuatu yang dapat mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan serta daya saing perekonomian nasional.

Pentingnya Kolaborasi Fintech dan UMKM dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional



Kamis, 22 April 2021. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digital yang produktif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia telah menyentuh angka 64,2 juta di tahun 2018 atau setara 99,99% dari jumlah pelaku usaha secara keseluruhan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo di awal bulan April 2021, angka rasio kredit yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM ditargetkan mencapai 30% di tahun 2024.

Dalam prakteknya, beberapa kendala UMKM dalam memperoleh akses terhadap kredit dari bank meliputi: (1) Minimnya informasi mengenai profil UMKM; (2) Belum memenuhinya persyaratan manajemen risiko; dan (3) Pencatatan keuangan yang kurang memadai; serta (4) Kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap alternatif pembiayaan lain. Fintech hadir menjadi solusi bagi UMKM yang terhambat mendapatkan kredit dari bank.

Selama pandemi Covid-19 ini, 52 penyelenggara fintech yang tergabung dalam Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) telah menyediakan total sekitar 55 program insentif, kemudahan, dan solusi finansial bagi masyarakat yang terdampak ekonominya. Hal ini terus dilakukan dan dikembangkan dengan melibatkan penyelenggara fintech yang berasal dari berbagai model bisnis seperti P2P lending, Financial Planner, Project Financing, Dompot Digital, dan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat besarnya potensi kolaborasi penyelenggara fintech dan pelaku UMKM dalam menghadirkan solusi nyata yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Apa yang dilakukan oleh para penyelenggara fintech selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa potensi fintech dalam mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional masih terbuka lebar. Untuk itulah, acara hari ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya pegiat UMKM, dalam hal mendapatkan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan digital lainnya dari penyelenggara fintech,” ujar **Bapak Aldi Haryoprato**, Wakil Ketua Umum AFTECH, kala membuka acara FinTech Talk yang bertajuk “Peningkatan Literasi Keuangan Digital & Potensi Kerjasama UMKM dengan Fintech dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” secara virtual.

Senada dengan Bapak Aldi, **Bapak Rizal Edwin Manansang**, Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian RI, menyampaikan bahwa peran fintech dalam membantu digitalisasi UMKM di Indonesia sangatlah signifikan.

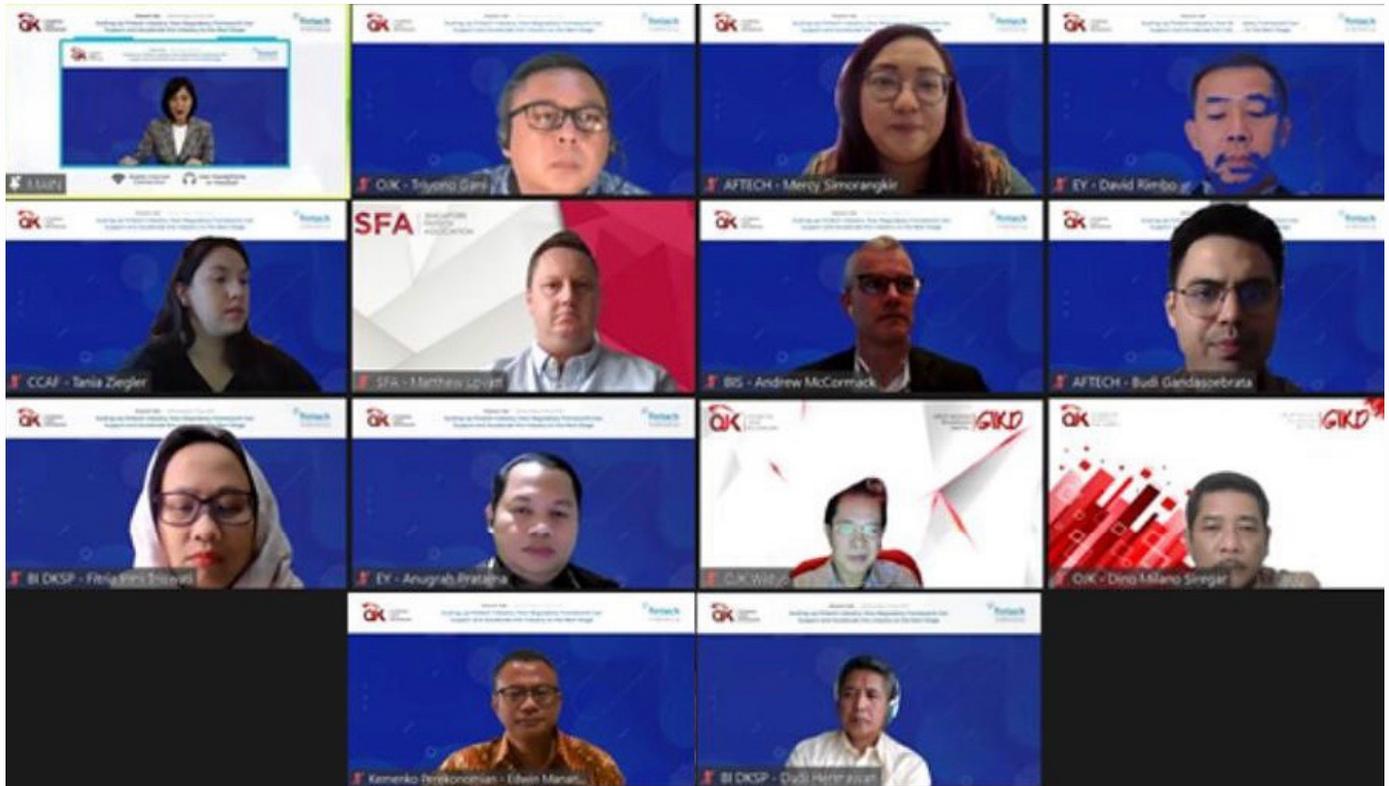
“Seiring dengan berkembangnya digitalisasi dalam dunia kita dewasa ini, saya meyakini bahwa kolaborasi antara penyelenggara fintech dan pelaku UMKM tidak hanya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, namun juga memberikan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan lain bagi UMKM yang mungkin selama ini masih belum tersentuh layanan perbankan. Tentu, hal ini tidak mudah. Peningkatan literasi masyarakat akan solusi keuangan digital adalah pekerjaan rumah kita bersama-sama,” kata Bapak Edwin.

Dalam kegiatan ini, hadir pula mewakili OJK, **Bapak Triyono Gani**, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD). OJK telah mencermati pesatnya perkembangan industri fintech baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Dalam memaknai pesatnya perkembangan UMKM di tanah air, para penyelenggara Inovasi Keuangan Digital perlu berkolaborasi dengan anggota ekosistem keuangan lainnya dan masyarakat, khususnya UMKM di dalamnya. Meningkatkan akses kepada layanan keuangan digital dan pemahaman pelaku UMKM terhadap manfaat dan risiko penggunaan fintech dalam kegiatan usaha mereka merupakan hal utama yang perlu kita lakukan secara berkelanjutan,” ujar Bapak Triyono.

FinTech Talk ini juga menghadirkan beberapa tokoh seperti **Bapak Dino Milano Siregar** (Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan), **Ibu Irene Swa Suryani** (Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM RI), **Bapak Benedicto Haryono** (CEO & Co-Founder KoinWorks), **Bapak Adjie Wicaksana** (Co-Founder & CEO Halofina), **Bapak Sandy Triady** (CFO Rahsa Nusantara), dan **Bapak Mercy L. Rumondor** (Direktur RX Fashion) sebagai Panelis serta **Ibu Petty S. Fatimah** (Direktur Editorial Prana Group & Chief Community Officer Femina) sebagai Moderator.

“Scaling-up Fintech Industry: How Regulatory Framework Can Support and Accelerate the Industry to the Next Stage”



Rabu, 5 Mei 2021. Kerangka regulasi yang mendorong inovasi teknologi sekaligus tata kelola yang baik, termasuk prinsip-prinsip perlindungan konsumen di dalamnya, merupakan faktor penting yang sangat berperan dalam mendukung perkembangan dan daya saing industri fintech di Indonesia. Hal ini menjadi kesadaran bersama di antara regulator dan para penyelenggara fintech sehingga mendorong para pihak untuk terus belajar dari negara-negara lain di Asia Tenggara maupun dalam konteks global. Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD), AFTECH menghadirkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya di dalam penyelenggaraan kegiatan FinTech Talk ini.

Dibuka oleh Bapak Triyono Gani (Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK) dan Bapak Budi Gandasoebrata (Wakil Ketua Umum AFTECH), para narasumber yang hadir mewakili EY Indonesia, Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub, Singapore Fintech Association, dan Cambridge Centre of Alternative Finance (CCAF). Turut hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Kemendagri RI, Bank Indonesia, BAPPENAS, serta penyelenggara dan penggiat fintech di Indonesia. Di akhir diskusi, AFTECH sekali lagi menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan kolaborasi dengan regulator dan pemerintah dalam rangka membangun iklim regulasi yang kondusif bagi kemajuan industri fintech Tanah Air.



Teknologi cloud untuk fintech kian menjadi kebutuhan

Selasa, 29 Juni 2021

Kepala Eksekutif Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani mengatakan adopsi teknologi komputasi awan (cloud) untuk keuangan digital (fintech) akan semakin digunakan demi keberlangsungan bisnis serta mengikuti kebutuhan masyarakat, serta sejalan perkembangan teknologi jaringan generasi kelima (5G). "Kami memiliki dan menunjukkan gestur positif untuk perkembangan inovasi keuangan Indonesia. Bicara soal cloud computing, dengan adanya bandwidth yang lebih besar, dengan adanya pengenalan 5G, semua bisa dilakukan dengan internet," kata Triyono dalam diskusi daring, dikutip Selasa. "Konsep cloud mungkin dulu kurang dilirik karena internet kita masih belum sestabil sekarang. Dengan adanya 'jalan tol' internet ini, semua menjadi mungkin. Efisiensi dan inovasi semakin marak sekarang, dan perkembangannya positif, yang jelas, termasuk cloud," imbuhnya.

Lebih lanjut, Triyono mengatakan kehadiran cloud kini sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya sekadar pelengkap. "Cloud sangat dibutuhkan. Betapa simpelnya untuk memanfaatkan cloud untuk penggunaan personal maupun industri. Tanpa cloud, fintech itu akan menjadi tidak mungkin," jelasnya. Menambahkan, Head of Enterprise Digital Natives Sales Google Indonesia Sugianto Rahardja, mengatakan bahwa sektor fintech di Indonesia kini hadir untuk mengakselerasi inklusi finansial secara nasional. Dengan dukungan dari teknologi termasuk cloud, hal tersebut diharapkan bisa tercapai dengan cepat. "Dengan adanya cloud, bisa membantu di beberapa area. Fintech berada di ruang yang cepat dan fleksibel. Cloud bisa menyediakan kecepatan dan kelenturan itu. Lalu, dari segi biaya juga lebih efisien, dan cloud ini juga serverless -- sehingga tidak perlu khawatir dan bahkan bisa membantu menyediakan teknologi dengan cepat," kata Sugianto. Di sisi lain, Executive Director Asia Cloud Computing Association Lim May-Ann optimistis akan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut Lim, masih banyak ruang dan potensi yang bisa digali Indonesia di sektor ini. "Kami sangat menantikan seperti apa perkembangan fintech di Indonesia, terlebih dengan banyaknya unicorn yang berasal dari Indonesia. Ini adalah pondasi yang bagus untuk pertumbuhan partisipasi di ekonomi digital; bukan hanya di Indonesia, namun juga di Asia dan dunia," kata Lim. "Sekarang adalah bagaimana menggunakan infrastruktur ini untuk mengakselerasinya lebih jauh. Ada banyak tools yang digunakan, termasuk di cloud, untuk dimanfaatkan di ruang bisnis maupun pelanggan. Runway untuk adopsi cloud di Indonesia masih sangat potensial untuk dieksplor," pungkasnya.

Sumber: [Antarnews](#)

“Keamanan Siber (Cybersecurity) dan Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) di Indonesia”



Rabu, 30 Juni 2021. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama lebih dari setahun terakhir telah mengubah pola interaksi masyarakat serta cara bisnis beroperasi. Data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2020) menunjukkan bahwa selama tahun 2020, terdapat sekitar 10,2 juta UMKM yang menggunakan teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Angka ini meningkat kurang lebih 13% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun di satu sisi pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku UMKM tetap terhubung dengan konsumen dan dapat menjangkau konsumen baru serta meningkatkan pendapatan, adaptasi digital juga memiliki risiko, di antaranya risiko siber seperti penipuan online, peretasan, pemalsuan identitas, dan bocornya data konsumen. Kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian material maupun nonmaterial bagi pelaku usaha UMKM.

Jumlah kejahatan siber yang terjadi diseluruh dunia sejak tahun 2020 terus meningkat. Oleh sebab itu perhatian atas keamanan siber tidak hanya penting bagi perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dan global, namun juga penting bagi UMKM. Statistik yang dirilis Fundera (2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 43% dari total serangan siber yang terjadi ditujukan pada

usaha kecil, dan kesalahan manusia merupakan salah faktor terbesar yang mempengaruhi keamanan siber sebuah perusahaan. Kurangnya pemahaman akan keamanan siber juga dianggap sebagai penyebab utama mengapa masih banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, sangat rentan terhadap kejahatan di jagat maya.

Edukasi mengenai keamanan siber sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keamanan siber menjadi salah satu upaya penting yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti perusahaan, asosiasi, dan pemerintah secara sinergis dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Menurut statistik yang dirilis oleh Cybint (2020) saat ini sebesar 77% perusahaan tidak memiliki rencana mitigasi terhadap serangan siber. Sebagai wujud upaya sinergis tersebut di atas AFTECH dan Mastercard Indonesia melaksanakan kegiatan FinTech Talk dengan judul "Keamanan Siber (Cybersecurity) dan Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) di Indonesia". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM nasional dari berbagai sektor mengenai pentingnya memahami dan mulai menerapkan langkah-langkah yang fokus pada keamanan siber perusahaan.

“Diskusi hari ini sangat bermanfaat untuk sedikitnya dua hal. Pertama, memetakan tantangan-tantangan atau gangguan-gangguan yang UMKM hadapi terkait keamanan siber. Kedua, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang dapat dilakukan, baik itu secara mandiri maupun berkolaborasi, untuk memperkuat keamanan siber perusahaan agar tidak menjadi korban kejahatan siber,” kata Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum AFTECH, ketika membuka kegiatan ini.

Menurut Marshall, ungkapan lama yang menyatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati adalah relevan dalam konteks keamanan siber. Ketika tidak terjadi gangguan siber, para pelaku usaha seharusnya tidak boleh lengah dan menganggap bahwa standar keamanannya sudah cukup. Para pelaku usaha tetap harus mencermati potensi serangan siber dan melakukan langkah-langkah yang tepat agar usahanya dapat berjalan dengan aman, khususnya saat bertransaksi secara online.

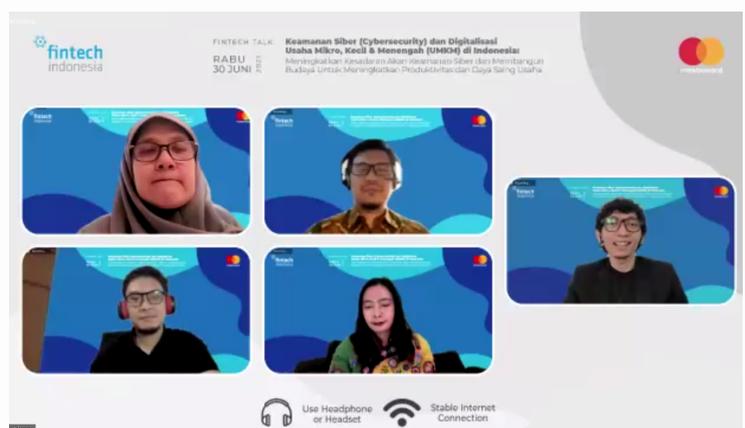
Navin Jain, Country Manager, Indonesia, Mastercard, mengatakan “Di tengah pengadopsian perangkat digital yang dilakukan oleh para UMKM agar dapat tetap kompetitif di era normal baru, UMKM juga harus memprioritaskan keamanan siber mereka. Tidak ada bisnis yang terlalu kecil untuk menjadi sasaran target kejahatan siber. Mastercard berupaya untuk senantiasa mendukung para UMKM dengan keterampilan keamanan siber yang mereka butuhkan guna mendorong pemahaman seputar teknologi dan manfaat yang dapat dinikmati dari keamanan siber, meningkatkan kapasitas mereka, dan menawarkan berbagai solusi keamanan dari Mastercard. Bersama dengan para mitra, Mastercard berkomitmen untuk membangun

dunia digital inklusif yang dapat dioperasikan secara praktis, aman, dan nyaman.”

Dari segi regulasi, Retno Artinah, Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara, yang hadir sebagai pembicara menyatakan bahwa masalah keamanan informasi bagi pelaku UMKM dianggap permasalahan yang baru, hal ini tidak hanya di Indonesia, namun juga di terjadi di beberapa negara.

“Salah satu tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital. Rendahnya literasi menjadi faktor penting yang menyebabkan rentannya UMKM terhadap serangan siber. Kami menyambut baik kegiatan literasi tentang keamanan informasi secara rutin dilakukan oleh industri fintech. Diharapkan, para pelaku usaha UMKM ke depannya dapat lebih siap dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi,” kata Retno.

FinTech Talk ini juga menghadirkan narasumber seperti Agrian Pangestu (Cyber & Intelligence Product Manager, Mastercard), Niken Tanyo Sudharmono (pemilik Kenskinicare dan Coklatchiccake), dan Rachmat Anggara (anggota HIPMI Jaya) serta Adjie Wicaksana (Co-Founder & CEO Halofina) sebagai Moderator.



Sepak Terjang Modalku di Indonesia:

Dari Pinjaman Modal Sampai Menjaga Keberlangsungan UMKM

Perkenalan Iwan Kurniawan, Wakil Bendahara I, Dewan Pengurus Harian AFTECH dan Co-Founder & COO Modalku, pada dunia fintech bukanlah sebuah kebetulan. Mengawali kariernya sebagai konsultan manajemen di salah satu perusahaan konsultan global yang berfokus pada pengembangan strategi dan manajemen risiko dalam industri jasa keuangan, hidup membawanya bertemu dengan Reynold Wijaya di tahun 2016. Keduanya kemudian memutuskan untuk mendirikan perusahaan bernama Modalku di Indonesia karena melihat *financing gap* di Indonesia masih cukup besar, di mana jumlah orang yang belum mendapatkan akses terhadap layanan keuangan masih terbilang cukup banyak dibandingkan yang sudah mendapatkan akses. Kali ini, tim Sekretariat AFTECH berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan peraih penghargaan Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2018 ini.

Bolehkah sedikit diceritakan mengenai Modalku dan apa yang dilakukannya di Indonesia?

Modalku merupakan pionir platform fintech lending di Indonesia dan sudah mendapatkan izin usaha dari OJK sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp23,5 triliun kepada lebih dari 4 juta transaksi pinjaman UMKM di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian kontribusi UMKM di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional di tahun 2020 adalah sebesar 61%, namun perhatian terhadap para UMKM ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan akses pendanaan. Di sinilah Modalku hadir menyediakan



solusi bagi UMKM dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha tanpa agunan.

Modalku fokus sepenuhnya pada layanan pinjaman usaha bagi UMKM lokal, baik untuk segmen mikro termasuk pengusaha online, sampai segmen UKM yang sudah lebih stabil dan memiliki omzet lebih besar. Selain itu Modalku juga bekerjasama dengan e-commerce untuk memperluas jangkauan kami.

Selain menyediakan pinjaman untuk modal usaha, Modalku juga ingin berkontribusi lebih dalam menjaga keberlangsungan suatu usaha. Misalnya, produk "Modal Karyawan" yang diperuntukkan bagi perusahaan yang ingin menyediakan fasilitas finansial kepada karyawan namun tetap bisa fokus dalam menjalankan bisnisnya. Juga dengan produk "Modal Hunian" yang bisa digunakan oleh pelaku bisnis properti dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi penyewa.

Dari sisi UMKM-nya, apakah ada kendala atau hambatan dari mereka dalam menggunakan layanan fintech?

Khusus fintech lending yang menghubungkan antara pendana dan peminjam/UMKM,

tantangan yang saat ini dihadapi adalah edukasi mengenai manfaatnya. Masih banyak UMKM yang belum mengetahui bahwa solusi fintech ada dan hadir untuk mereka. Apabila mereka sudah mengetahui, tantangan selanjutnya adalah mengedukasi mereka mengenai cara menggunakannya.

Di sisi lain, terhambatnya akses untuk pemanfaatan ekosistem ekonomi digital juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan sosial dalam penggunaan akses internet tetap ada. Lebih lanjut, kesenjangan digital juga menjadi tantangan. Masyarakat dengan kesenjangan digital cenderung lebih suka untuk mendapatkan informasi dari teman atau keluarga dibandingkan informasi dari internet sehingga tidak jarang dampak dari *word of mouth* tersebut justru merugikan. Sebagai contoh, masih ada masyarakat yang tertipu dengan fintech lending ilegal karena informasi dari mulut ke mulut itu.

Selain upaya edukasi masyarakat, hal lain apa yang akan Modalku lakukan untuk memperluas akses pendanaannya?

Ke depannya fintech lending secara umum, termasuk Modalku, akan terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik platform digital lainnya atau dengan perbankan. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendanaan sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi lapisan masyarakat, khususnya usaha kecil yang belum terlayani namun memiliki potensi untuk berkembang.

Data PwC tahun 2019 menunjukkan bahwa 7 dari 10 UMKM tidak bisa mendapatkan akses pendanaan untuk mengembangkan usahanya karena masih dianggap kurang layak mendapatkan pinjaman. Misalnya, karena mereka belum memiliki agunan atau belum memiliki badan usaha. Kenyataan ini mendorong kami untuk memperluas akses pendanaan bagi UMKM dan akhirnya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

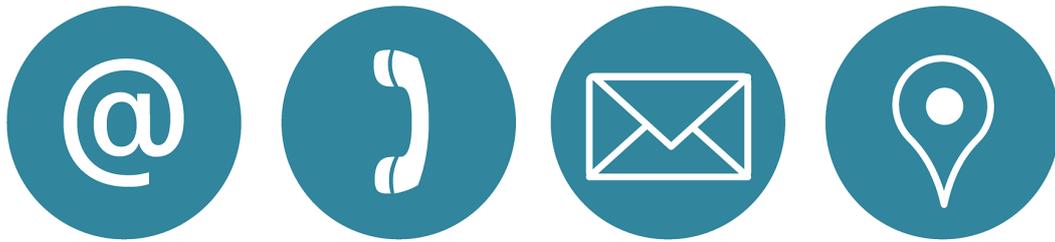
Apakah Anda mempunyai saran bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan permodalan dari layanan fintech?

Agar bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, pelaku UMKM sebaiknya memiliki laporan keuangan yang terstruktur. Di Modalku, sebagai contoh, meskipun pinjaman bisa diberikan tanpa agunan, laporan keuangan/ arus kas UMKM menjadi salah satu faktor utama pertimbangan kami dalam menilai pengajuan pinjaman UMKM.

Selain itu, saran saya kepada teman-teman pelaku UMKM adalah jangan takut untuk memanfaatkan teknologi digital, yang tentunya bisa berdampak positif bagi bisnis. Modalku menyediakan pinjaman dengan proses secara digital sehingga tidak membebani pelaku UMKM untuk bertemu secara tatap muka. Seluruh tahapan proses bisa dilakukan secara online melalui website dan pelaku usaha bisa menghemat waktu dan tetap fokus menjalankan usahanya. Kami juga memberikan biaya pinjaman yang lebih kompetitif. Peminjam pun dapat memilih waktu pembayaran dan tingkat suku bunga yang lebih fleksibel.

Ke depannya, apa yang menjadi target dari Modalku?

Fokus utama kami adalah menjangkau lebih banyak UMKM serta pendana melalui inovasi produk serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk tetap bisa bertumbuh secara positif di tahun ini. Beberapa layanan juga baru sedang kami persiapkan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing target konsumen kami.



Untuk mendapatkan informasi mengenai keanggotaan AFTECH dan permohonan kerjasama dapat menghubungi kontak berikut:

Aryani Hapsari

Event Manager

aryanie@fintech.id

+62812-8848-6528

IKUTI KAMI:



@fintechid



Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



GoWork, Sampoerna Strategic Square, North Tower, 25th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45
Setiabudi, Jakarta 12930